

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Realisasi Pendapatan Daerah Jabar Capai Rp 32,16 Triliun
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.3
Edisi	: Kamis, 5 Juli 2018

Realisasi Pendapatan Daerah Jabar Capai Rp 32,16 Triliun

BLK. FACTORY, (GM).-

Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai 31 Desember 2017 menyentuh angka Rp 32,16 triliun. Jumlah ini meningkat dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 31,37 triliun atau mencapai 102,53%.

Penjabat Gubernur Jabar, H. Mochamad Iriawan menyampai-kannya dalam rapat paripurna DPRD Jabar tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, di kantor DPRD Jabar, Selasa (3/7).

Iriawan memaparkan pendapatan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp 18,08 Triliun lebih atau 105,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 17,22 Triliun.

"PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, semua rata-rata pencapaiannya meningkat dari yang kita tetapkan," paparnya.

Pada kesempatan itu, Iriawan pun mengungkapkan sumber lain dari pendapatan daerah tahun 2017, yaitu dari dana perimbangan yang realisasinya mencapai Rp 13,98 triliun. Dana tersebut didapat dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Kemudian pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang asli sebesar Rp 101,38 miliar.

Iriawan juga melaporkan pertanggungjawaban belanja daerah tahun 2017, yang realisasinya mencapai Rp 32,79 triliun atau 95,07% dari alokasi anggaran sebesar Rp 34,49 triliun. Ia mengatakan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Jabar merupakan salah satu kewajiban konstitusional selaku kepala daerah dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui DPRD.

"Laporan keuangan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ujarnya.

WTP

Dari hasil pemeriksaan BPK RI yang telah disampaikan pada rapat paripurna istimewa tentang penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tanggal 28 Mei 2018 lalu, Pemprov Jabar kembali dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

"Keberhasilan WTP tujuh kali berturut-turut ini harus kita sukuri karena merupakan satu indikator bahwa pengelolaan keuangan kita telah dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel," kata Iriawan.

Laporan keuangan dalam rapat paripurna DPRD itu, disajikan secara lengkap, rinci, akuntabel dan transparan. Iriawan meminta komitmen kuat dari Pemprov Jabar, DPRD Jabar dan seluruh komponen masyarakat agar terus menghadirkan APBD yang lebih berpihak pada kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mewujudkan Jabar sebagai Provinsi termaju di Indonesia," pungkasnya. (B.81)**



H. Mochamad Iriawan